

BAB II

DESKIRPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun fungsinya antara lain adalah, membentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) bersama Gubernur, fungsi anggaran (persetujuan bersama Perda APBD yang diajukan Gubernur), fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan pelaksanaan perda/perdais, atau pergub, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan DIY, dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

1. Visi dan Misi DPRD

a. Visi :

Menjadi institusi Profesional, Antisipatif, Responsive, dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD.

b. Misi :

- Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah
- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya DPRD

- Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Pimpinan DPRD DIY

Susunan Pengurus dan Daftar Anggota Pimpinan DPRD DIY periode 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Susunan Pimpinan DPRD DIY

Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta	
KETUA DPRD	PARTAI
H Yoeke Indra Agung L, SE.	PDI Perjuangan
WAKIL KETUA DPRD	
Arif Noor Hartanto, S.IP	Partai Amanat Nasional
Hj. Rany Widayati, S.E., M.M	Partai Golkar
Dharma Setyawan, MBA	Partai Gerindra

Jumlah Anggota DPRD DIY yang terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2014 adalah 55 Orang, yang terdiri dari 9 Partai politik, di 7 daerah pemilihan (dapil) di DIY

3 Alat Kelengkapan Dewan

Ada beberapa alat kelengkapan dewan yang dibentuk, guna untuk membantu Anggota DPRD DIY dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Alat Kelengkapan Dewan diantaranya adalah Pimpinan DPRD, Komisi yang terdiri dari 4 bidang, Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang ekonomi dan keuangan, Komisi C

bidang pembangunan, dan Komisi D bidang kesejahteraan rakyat, selanjutnya adalah Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Panitia Khusus, serta Badan Kehormatan.

Tabel 2.2
Susunan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 2014 – 2019 Berdasarkan Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH	Presentase
1.	PDI Perjuangan	14 Orang	25,45%
2.	Partai Golkar	8 Orang	14,54%
3.	PAN	8 Orang	14,54%
4.	Partai Gerindra	7 Orang	12,72%
5.	PKS	6 Orang	10,90%
6.	PKB	5 Orang	9,09%
7.	PPP	3 Orang	5,45%
8.	Partai Demokrat	2 Orang	3,63%
9.	Partai NasDem	2 Orang	3,63%
JUMLAH ANGGOTA :		55 Orang	100 %

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

Sedangkan susunan keanggotaan dewan berdasarkan jenis kelamin di DPRD DIY adalah sebagaimana di jelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Susunan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode
2014 – 2019 berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	LAKI – LAKI	49 Orang	89 %
2.	PEREMPUAN	6 Orang	11 %

B. Fraksi – Fraksi DPRD DIY

1) Pengertian Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan fungsi, tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan sedikitnya 4 orang, jika tidak dapat memenuhi aturan tersebut, anggota DPRD bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Partai Politik harus mendudukkan anggotanya di dalam satu fraksi. Berdasarkan Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dalam pasal 42 poin b menjelaskan bahwa tugas pokok pimpinan sementara DPRD adalah memfasilitasi pembentukan fraksi. Untuk menindaklanjuti rapat Gabungan Pimpinan Sementara dengan Koordinator Kelompok Fraksi-Fraksi pada hari Rabu, tanggal 8 September 2014 telah diputuskan terbentuknya kelompok Fraksi yaitu pimpinan dan keanggotaan Kelompok Fraksi-fraksi.

Rapat Paripurna Ke-56 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014 dengan acara Pengumuman Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara No 25 Tahun 2014. Pimpinan Sementara membacakan dan mengumumkan hasil pembentukan kelompok fraksi dari masing-masing partai politik sebagai berikut:

a. Fraksi PDI Perjuangan

Berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, kelompok Fraksi oleh partai dinamakan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)** susunan Personalia sebagai berikut:

Pimpinan Fraksi

- Eko Suwanto, ST, M.Si sebagai **Ketua**
- R.B. Dwi Wahyu Budianto, S.Pd, M.Si sebagai **Wakil Ketua**
- Drs. Sudarto sebagai **Sekretaris**

Anggota Fraksi

- H. Yoeke Indra AL, SE
- Tustiyani, SH
- KPH. Purbodiningrat, SE, MBA
- Joko B Purnomo
- Chang Wendryanto, SH
- Gimmy Rusdin Sinaga, SE
- H. Koeswanto, S.IP
- H. Rendradi Suprihandoko, SH, M.Hum
- G.M. Totok Hedi Santosa
- Nuryadi, S.Pd
- H. Bambang Chrisnadi, SH, M.Si

b. Fraksi Partai Amanat Nasional

Berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, kelompok Fraksi oleh partai dinamakan **Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)** susunan Personalia sebagai berikut:

Pimpinan Fraksi

- Suharwanta, ST sebagai **Ketua** merangkap anggota
- Ir. Hamam Mustaqim sebagai **Wakil Ketua** merangkap anggota
- Arief Setiadi, S.IP sebagai **Sekretaris** merangkap anggota

Anggota Fraksi

- Ir. Atmaji
- Arif Noor Hartanto , S.IP
- Sadar Narima, S. Ag, SH
- Drs. Marthia Adelheida
- Drs. Sutata

c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia, Kelompok Fraksi oleh Partai Politik tersebut, dinamakan **Fraksi Partai Gerindra (F-Partai Gerindra)** susunan Personalia sebagai berikut:

Pimpinan Fraksi

- Suroyo sebagai **Ketua**
- H. Yoserizal, SH sebagai **Wakil Ketua**
- Anton Prabu Semendawai, SH sebagai **Sekretaris**
- Hery Sumardianto sebagai **Bendahara**

Anggota Fraksi

- Darma Setiawan, MBA
- Danang Wahyu Broto, SE, M.Si
- Setyyo Wibowo, SE

d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta, Kelompok Fraksi oleh Partai Politik tersebut, dinamakan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)** susunan Personalialia sebagai berikut:

Pimpinan Fraksi

- Ir. Arief Budiono sebagai **Ketua**
- H. Muhammad Zuhri Hudaya, ST sebagai **Wakil Ketua**
- Nur Sasmito, ST, MM sebagai **Sekretaris**

Anggota Fraksi

- Huda Tri Yudianta, ST - Agus Sumartono
- H. Nandar Widoro, ST

e. Fraksi Golongan Karya

Berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta, kelompok Fraksi oleh partai dinamakan **Fraksi Partai GOLONGAN KARYA (F-P GOLKAR)** susunan Personalia sebagai berikut:

Pimpinan Fraksi

- Janu Ismadi, SE sebagai **Ketua**
- Drs. H. Agus Subagyo sebagai **Wakil Ketua**
- Nurjanah sebagai **Sekretaris**

Anggota Fraksi

- Hj. Rany Widayanti, SE, MM
- Slamet, S.Pd, MM
- Agus Sumaryanto, ST
- Drs. H. Suwardi
- SUKARMAN, S.Pd

7) Fraksi Gabungan I (Fraksi Partai Kebangkitan Demokrasi)

Berdasarkan Surat Pimpinan Wilayah Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta, Kelompok Fraksi oleh Partai Politik tersebut, dinamakan **Fraksi Kebangkitan Demokrasi** susunan komposisi Personalia sebagai berikut:

- H. Sukanto, SH sebagai **Ketua**
- Subarno sebagai **Wakil Ketua**
- Drs. Aslam Ridlo sebagai **Sekretaris**

Anggota Fraksi

- H.M. Anwar Hamid, S.Sos
- Drs. Rojak Harudin
- Sudaryanto , SH
- Sambudi, ST
- Suparja,S.IP

8) Fraksi Gabungan II (Fraksi Persatuan Demokrat)

Berdasarkan Surat Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surat Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kelompok Fraksi oleh Partai Politik tersebut, dinamakan **Fraksi Persatuan Demokrat** susunan komposisi Personalia sebagai berikut:

Pimpinan Fraksi dan Anggota Fraksi :

- Drs. H. Edy Susila sebagai **Ketua**
- Hj. Erlia Risti, SE sebagai **Wakil Ketua**
merangkap anggota
- H. Muhammad Yazid sebagai **Sekretaris** merangkap
anggota

C. Tugas Fraksi

Fraksi – fraksi perwakilan partai politik yang ada di DPRD DIY mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat pandangan umum fraksi

- b. Membuat pandangan akhir fraksi
- c. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD terhadap suatu masalah
- d. Merumuskan usulan – usulan untuk dibahas oleh kelengkapan DPRD
- e. Menerima dan merumuskan Aspirasi masyarakat
- f. Membuat klarifikasi tenaga sekretaris fraksi⁵

Tabel 2.4.
Susunan Anggota DPRD DIY Periode 2014 – 2019 berdasarkan Fraksi

No.	Partai Politik	Jumlah	Presentase
1.	Fraksi PDI Perjuangan	14 Orang	25,45 %
2.	Fraksi Partai Golkar	8 Orang	14,54 %
3.	Fraksi Partai Gerindra	7 Orang	12,72 %
4.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	6 Orang	10,90 %
5.	Fraksi Partai Amanat Nasional	8 Orang	14,54 %
6.	Fraksi Partai Kebangkitan Demokrasi	8 Orang	14,54 %
7.	Fraksi Partai Persatuan Demokrat	4 Orang	7,27 %
Jumlah		55 Orang	100

D. Sikap Fraksi DPRD DIY terhadap Suksesi kepemimpinan di kraton Yogyakarta

1. enam dari tujuh fraksi di DPRD DI Yogyakarta menolak usulan perubahan terhadap syarat calon Gubernur DIY. Mereka berpendapat, Gubernur DIY tetap harus dijabat laki-laki karena ketentuan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta sejalan dengan aturan internal Keraton Yogyakarta.

Sikap fraksi-fraksi itu terlihat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Selasa (24/3), di Yogyakarta.

"Dari tujuh fraksi di DPRD DIY, hanya Fraksi PDI-P yang belum menentukan sikap," kata Wakil Ketua Pansus Raperdais Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Purbodiningrat sesuai rapat.

DPRD DIY tak kunjung mengesahkan Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub karena anggota Dewan masih berbeda pendapat ihwal Pasal 3 Ayat (1) huruf m yang terdapat dalam aturan tersebut. Poin yang diperdebatkan menyatakan, calon Gubernur dan Wagub DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Secara tersirat, aturan itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki.

Karena Gubernur DIY juga merupakan Raja Keraton Yogyakarta, perdebatan melebar ke suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta. Situasi makin rumit karena Raja Keraton Yogyakarta Sultan HB X tidak punya anak lelaki. Dalam beberapa kesempatan, Sultan yang juga Gubernur DIY meminta pasal itu direvisi sehingga memungkinkan perempuan menjabat sebagai gubernur. Namun, tiga adik Sultan menentang usulan itu.

KPH Purbodiningrat mengatakan, enam fraksi yang menolak mengubah syarat calon Gubernur DIY itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Nasional, dan Fraksi Persatuan Demokrat. "Fraksi Gerindra yang sebelumnya belum menyatakan sikap sekarang sudah bersikap," katanya. Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Arief Budiono memaparkan, syarat calon Gubernur DIY yang diatur dalam

Raperdais Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub sudah sesuai dengan UU Keistimewaan DIY. Oleh karena itu, tak perlu ada revisi, termasuk terkait aturan daftar riwayat hidup calon gubernur. "Jika aturan itu direvisi, raperdais akan bertentangan dengan UU Keistimewaan DIY," katanya. Selain itu, lanjut Arief, ketentuan bahwa Gubernur DIY harus dijabat laki-laki juga sesuai dengan paugeran atau adat istiadat Keraton Yogyakarta yang menyatakan Raja Keraton Yogyakarta harus dijabat laki-laki.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, fraksinya sedang melakukan studi dan meminta pendapat para tokoh terkait ketentuan yang diperdebatkan. Rencana awal, DPRD DIY akan menggelar rapat paripurna pada 30 Maret. Namun, Fraksi PDI-P minta rapat paripurna diundur jadi 2 April. Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias, menilai, raperdais ini sebetulnya kurang urgen untuk dibahas. Alasannya, pergantian jabatan Gubernur DIY dan suksesi Raja Keraton Yogyakarta tak akan terjadi dalam waktu dekat. Apalagi, UU Keistimewaan DIY mengatur soal pengisian jabatan Gubernur DIY.

Pada 2012, Sultan bisa ditetapkan menjadi Gubernur DIY hanya berdasarkan UU Keistimewaan DIY. Jadi perlu dipertanyakan apakah raperdais benar-benar dibutuhkan," ujarnya.

Dia berharap semua pihak memahami Sultan HB X memikul beban berat terkait suksesi raja di Keraton Yogyakarta. "Tugas terberat seorang raja ialah memilih pengganti karena dia mengemban amanat dari

leluhurnya juga. Jika seorang raja salah memilih pengganti, seluruh jejaknya dan leluhurnya akan mudah dilupakan orang,

D. Sejarah Suksesi Kepemimpinan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Pasca meninggalnya Sultan Agung sebagai Raja Mataram, takhta diberikan kepada putranya bernama Raden Mas Sayidin, dan secara resmi dinobatkan pada tahun 1646, dengan gelar Amangkurat I atau Mangkurat, lengkapnya adalah Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung. Ia memerintah dari tahun 1646 hingga tahun 1677. Amangkurat I meninggal pada 13 Juli 1677 di Desa Wanayasa, Banyumas, karena jatuh sakit dan diberi air kelapa beracun oleh anaknya sendiri, walaupun ia telah memberikan takhta kepada anaknya bernama Mas Rahmat yang telah diangkat sebagai putra mahkota. Mas Rahmat menjadi Amangkurat II, yang sangat patuh kepada VOC, sehingga banyak terjadi pemberontakan. Pengganti Amangkurat II berturut – turut ialah Amangkurat III (1703-1708), Pakubuwana I (1704-1719), Amangkurat IV (1719-1726), dan Pakubuwana II (1726-1749). VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang VOC, sehingga mengangkat Pakubuwana I (Puger) sebagai raja. Akibatnya Mataram memiliki dua raja, dan ini menyebabkan perpecahan internal. Suksesi kepemimpinan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dimulai dari Sri Sultan Hamengkubuwana I yang merupakan putra dari Sunan Amangkurat IV, yang mendirikan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, pasca perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755 yang memisahkan kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu

Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwana I menjabat sebagai raja dari tahun 1755 hingga tahun 1792, setelah itu digantikan putranya bernama GRM Sundoro, yang diangkat menjadi putra mahkota, dan dilantik menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana II menggantikan ayahnya pada tahun 1792 hingga tahun 1810, serta menjabat kembali pada tahun 1811 – 1812. Setelah itu, GRM Suroyo dinobatkan menjadi putra mahkota serta pengganti dari Sri Sultan Hamengkubuwana II pada tahun 1810 hingga 1811 dan tahun 1812 – 1814. Sri Sultan Hamengkubuwana II dan III saling bergantian takhta karena timbul permasalahan baik di dalam internal maupun eksternal keraton. Pasca permasalahan pergantian takhta antara Hamengkubuwana II dan III, takhta diberikan kepada anak dari Hamengkubuwana III bernama GRM Ibnu Jarot sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana IV pada tahun 1814 – 1823 pada usia 10 tahun.

GRM Gathot Menol, anak dari Sri Sultan Hamengkubuwana IV menjadi putra mahkota, dan diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya pada tahun 1823, pada saat usianya baru 3 tahun, sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana V. Pada saat kepemimpinan HB V, kepemimpinan beralih ke Sultan Sepuh, julukukan HB II pada tahun 1826 – 1828. Kepemimpinan kembali ke HB V pada tahun 1828 hingga 1855. Kepemimpinan selanjutnya tidak beralih pada keturunan HB V, tetapi diserahkan kepada adiknya bernama GRM Mustodjo yang juga merupakan putra dari HB IV pada tahun 1855, dikarenakan HB V tidak meninggalkan keturunan. Sri Sultan Hamengkubuwana VI memimpin keraton dari tahun

1855 hingga 1877, setelah itu diberikan pada putranya yang bernama GRM. Murtedjo, yang diangkat sebagai putra mahkota dan dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana VII pada tahun 1877. Selama 44 Tahun bertakhta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana VII, ia memberikan takhtanya kepada putra mahkota bernama GRM. Sudjaji pada tahun 1921. GRM. Sudjaji dinobatkan menjadi Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat , bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana VIII.

Sri Sultan Hamengkubuwana VIII segera menyerahkan keris Kyai Joko Piturun kepada putranya yang bernama GRM. Dorajatun, sebagai simbol pengangkatan putra mahkota dan penyerahan takhta Kerajaan. GRM. Dorajatun bukanlah putra pertama, ia dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada usia 27 Tahun. Sri Sultan Hamengkubuwana IX menjabat di era perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1939 hingga 1988. Ia tidak mengangkat putra mahkota pada saat menjabat sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Penerus takhta Keraton dilanjutkan dengan rapat keluarga keraton pada wal tahun 1989. GRM. Herjuno Darpito putra dari Sri Sultan Hamengkubuwa IX, dari istri yang bernama KRA. Widyaningrum diangkat sebagai putra mahkota, dengan gelar KGPH. Mangkubumi.

GRM. Herjuno Darpito bukanlah putra pertama dari Sri Sultan Hamengbuwana IX, putra pertamanya bernama KGPH. Poeroebojo. Pada tahun 1989, GRM Herjuno Darpito dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana X, hingga sekarang ia masih menjabat sebagai raja

Keraton. Sri Sultan Hamengkubuwana X menikah dengan GKR. Emas dan mempunyai 5 anak, yang semua adalah perempuan.

Gambar 1.1. Silsilah Sultan Yogyakarta



E. Silsilah Keturunan Sri Sultan Hamengkubuwana X

Berikut ini merupakan silsilah dari Sri Sultan Hamengkubuwana X menurut nasab islam, melalui ayahandanya hingga Ki Ageng Pamenahan, sebagai leluhur kerajaan Mataram Islam :

Sri Sultan Hamengkubuwana X **bin** Sri Sultan Hamengkubuwana IX **bin** Sri Sultan Hamengkubuwana VIII **bin** Sri Sultan Hamengkubuwana VII **bin** Sri Sultan Hamengkubuwana VI **bin** Sri Sultan Hamengkubuwana IV **bin** Sri Sultan Hamengkubuwana III **bin** Sri Sultan Hamengkubuwana II **bin** Sri Sultan Hamengkubuwana I **bin** Amangkurat IV **bin** Pakubuwana I **bin** Amangkurat I **bin** Sultan Agung **bin** Prabu Hanyokrowati **bin** Panembahan Senopati **bin** Ki Ageng Pamenahan

F. Pemerintahan

Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang cukup menarik baik bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Salah satu objek wisata yang selalu ramai dikunjungi adalah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Yogyakarta). Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi mengenai sistem pemerintahan yang ada di dalam Kraton Yogyakarta, sehingga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi wisatawan yang akan atau pernah mengunjungi Kraton Yogyakarta.

Setelah Kraton Yogyakarta dan Pakualaman bergabung pada NKRI melalui amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX tanggal 5 September 1945 maupun amanat Sri Pakualam VIII tanggal 30 Oktober 1945, sejak itu sampai sekarang pemerintahan kraton hanya terbatas pada lingkungan kraton dan hanya untuk kraton sendiri.

Pelaksanaan pemerintahan kraton, sultan dibantu terutama oleh rayi dalem (adik-adik Sultan) dan para abdi dalem.

Kawedanan Hageng Punokawan dan Kawedanan Hageng sebetulnya merupakan gabungan dari beberapa kawedanan dan tepas. Masing-masing Kawedanan Hageng Punokawan (3 buah) dan Kawedanan Hageng (1 buah) dikoordinasi oleh adik-adik sultan.

Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Purwa Budaya dikoordinasi atau diketuai oleh GBPH Yudaningrat, terdiri dari KHP Krida Mardawa (kesenian), Kawedanan Pengulon(keagamaan), Kawedanan Puralaya (pemakaman), dan Kawedanan Keputren(keputrian)

Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Nitya Budaya dikoordinasi atau diketuai oleh GBPH Prabukusumo, terdiri dari KHP Widya Budaya (upacara keraton), KHP Purayakara(aktiva terutama lampu dan barang keraton), Tepas Banjar Wilapa (perpustakaan),Tepas Musium (barang milk keraton), dan Tepas Pariwisata.

G. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa

dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa/km

Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Walau secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional, dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa bencana alam besar termasuk bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006, erupsi Gunung Merapi selama Oktober-November 2010, serta erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2014.

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut *Zelfbestuurlandschappen*/Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan, dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak

politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1942 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan asli), wilayah, dan penduduknya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta, dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
3. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah, dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949^[7] pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paku Alam X yang

sekaligus menjabat sebagai Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya, dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada $8^{\circ} 30'$ - $7^{\circ} 20'$ Lintang Selatan, dan $109^{\circ} 40'$ - $111^{\circ} 0'$ Bujur Timur. Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunungapi Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah.

Satuan fisiografi Gunungapi Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api termasuk juga bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah kerucut, dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunungapi aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata.

Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping dan bentang alam karst yang tandus, dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato Wonosari (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping, dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal, dan vegetasi penutup sangat jarang.

Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam, dan potensi air tanah kecil.

Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan fluvial (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan marin dan eolin yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan marin dan eolin di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan gumuk pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana, dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antarwilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju, dan berkembang.

Dua daerah aliran sungai (DAS) yang cukup besar di DIY adalah DAS Progo di barat, dan DAS Opak-Oya di timur. Sungai-sungai yang cukup terkenal di DIY antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Boyong-Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, dan Sungai Oya.

H. Sosial Budaya

Perkembangan jaman lambat laun telah menggerus kebudayaan daerah yang kita miliki. Bukan hanya masyarakat yang tinggal diperkotaan saja, namun hampir semua masyarakat dari seluruh lapisan semakin lupa atau bahkan tidak mengenal akan keberadaan kebudayaan daerah mereka sendiri yang seharusnya di jaga dan di lestarikan. Hal itu sedikit banyak disebabkan oleh pengaruh budaya asing terutama budaya barat yang masuk kedalam kebudayaan masyarakat jawa, yang salah satunya masuk melalui perkembangan teknologi. Namun kita tidak perlu berkecil hati dengan keadaan seperti itu, karena setidaknya kita masih memiliki Kraton Yogyakarta, yang

mampu menjaga budaya-budaya leluhur dengan keaslian bangunannya yang kental dengan nuansa jawa. Dengan adanya Keraton Yogyakarta budaya bangsa dapat lestarian untuk dibanggakan pada dunia luar terutama masyarakat Barat.

Kraton Yogyakarta memiliki berbagai macam benda hasil kebudayaan yang dapat kita lihat dengan cara mengelilingi dan melihat-lihat kraton Yogyakarta beserta bangunan-bangunan peninggalan dari orang-orang zaman dahulu yang berhubungan dengan kraton, yang sampai saat ini tetap berdiri kokoh. Kraton Yogyakarta, seakan identik dengan unsur kebudayaan Jawa yang sangat kental dan melekat pada masyarakat yang tinggal di kraton maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kraton, bahkan bisa di bilang merupakan pusat dari kebudayaan di Jawa. Kraton Yogyakarta dengan segala kekhasan budaya Jawa nya, memiliki arti simbolik di setiap bangunannya. Kraton Yogyakarta yang telah berganti pemimpinnya mulai dari Sri Sultan Hambengkubuwana I sampai XI, memiliki sejarah yang cukup panjang dan unik yang perlu kita ketahui dan pelajari. Hal ini dikarenakan tidak sedikit dari kita (masyarakat jawa jaman sekarang) yang tidak atau kurang memahami dan mengetahui apa sajakah bentuk kebudayaan yang ada di kraton Yogyakarta, bahkan sebagian orang beranggapan bahwa kraton tidak lebih dari sekedar tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono saja. Tetapi Denyut sendi kehidupan yang ada di dalam kraton memberikan kita pembelajaran bahwa, dikraton terdapat banyak kehidupan sosial masyarakat, banyak masyarakat yang hidup nya bergantung pada kraton, contohnya pemandu wisata, penjual jasa, pedagang sekitar kraton, penarik becak, dan

lain-lain. Sehingga dapat dikatakan kraton menghidupi masyarakat dan kelangsungan hidup mereka tergantung pula pada kelangsungan kraton.

Setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi diberi wilayah Yogyakarta. Kemudian untuk menjalankan pemerintahannya, Pangeran Mangkubumi membangun sebuah istana pada tahun 1755 di wilayah Hutan Beringan. Tanah ini di nilai cukup baik untuk membangun kerajaan yang akan di pimpinnya, karena di apit oleh dua sungai yang bisa melindungi dari kemungkinan banjir. Raja pertama di Kesultanan Yogyakarta adalah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I (HB I). Lokasi kraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggrahan yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di pemakaman Imogiri.

Karaton, Keraton atau Kraton, berasal dari kata ka-ratu-an, yang berarti tempat tinggal ratu/raja yang sedang memerintah. Sedang arti lebih luas, diuraikan secara sederhana, bahwa seluruh struktur dan bangunan wilayah Kraton mengandung arti berkaitan dengan pandangan hidup Jawa yang essensial, yakni **Sangkan Paraning Dumadi** (dari mana asalnya manusia dan kemana akhirnya manusia setelah mati).

Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler (Balairung Utara), Kamandhungan Ler (Kamandhungan Utara), Sri Manganti, Kedhaton, Kamagangan, Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan Siti Hinggil Kidul (Balairung Selatan. Selain itu Keraton Yogyakarta memiliki

berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah serta tradisi-tradisi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat pada jaman dulu, yang sekarang di turunkan kepada kita (masyarakat sekarang) untuk dijaga dan di lestarikan supaya budaya yang ada tidak luntur dan hilang, dengan adanya budaya yang masuk kedalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya yang akan selalu menjaga dan melestarikan budaya yang telah ada di sana. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Keraton Yogyakarta. Kraton merupakan mata air peradaban yang tak pernah surut di makan waktu. Sejak berdirinya, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, merupakan salah satu dari empat pusat kerajaan Jawa (projo kejawen) yang merupakan pewaris sah kejayaan kebudayaan Mataram.

Para raja Mataram dan kemudian para Sultan Yogya mendapat predikat sebagai raja pinandhita dan narendra sudibyo yaitu pencipta (kreator) kebudayaan yang produktif (Purwadi 2007). Para Sultan bersama para ahli adat, melahirkan gagasan-gagasan asli tentang seni, sastra, sistem sosial, sistem ekonomi, dan seterusnya. Sri Sultan Hamengku Buwono I misalnya, melahirkan banyak karya seni dan arsitektur. Dengan Kraton sebagai pusat, masyarakat Yogya sudah berkembang menjadi sebuah sistem peradaban tersendiri sejak sebelum bergabung dengan RI (1945). Itulah yang disebut dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum diamandemen) sebagai “susunan asli.” Sejak Kraton berdiri, Yogya telah mempunyai sistem pemerintahan tersendiri dan telah melakukan reformasi pada tahun 1926 (reorganisasi Pangreh Praja).

Kraton sebagai pusat peradaban terlihat dari pola penyebaran kebudayaan yang memancarkan keluar secara sentrifugal. Dulu, Kraton merupakan pusat pemerintahan politis. Wilayah kekuasaan kasultanan diklasifikasi menurut konsep lapisan konsentris trimandala praja. Lapisan terdalam yang merupakan wilayah pusat kerajaan disebut nagara, merupakan ibukota kerajaan yang menjadi tempat tinggal raja dan para pejabat penting. Pusat nagara adalah Kraton. Lapisan kedua, disebut wilayah nagaragung yaitu daerah-daerah sekitar kota. Lapisan ketiga, disebut wilayah monconagoro yaitu daerah-daerah yang letaknya jauh.

Dibandingkan dengan Kraton Yogya, Republik Indonesia adalah sebuah peradaban yang masih sangat muda. Yogya turut membidani kelahiran peradaban baru itu. Ketika RI mengalami masa-masa kelahiran yang sangat kritis, Yogya memberi diri menjadi "ibu pengasuh" dengan segala pengorbanannya. Secara politis itu sangat jelas, ibukota RI dipindah ke Yogya (sejak 1946). Kraton (Sri Sultan Hamengku Buwono IX) mengatur strategi Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk menunjukkan eksistensi RI di mata dunia dan sebagainya. Sejak awal, Yogya telah memberikan banyak nutrisi bagi pertumbuhan peradaban Indonesia. RI bagaikan bayi yang menyusu pada Yogya sebagai induk semangnya. Banyak gagasan peradaban muncul dari Yogya.

Dahulu bagian utama istana, dari utara keselatan, dimulai dari Gapura Gladhag di utara sampai di Plengkung Nirboyo di selatan. Bagian-bagian utama kraton Yogyakarta dari utara ke selatan adalah: Gapura Gladag-Pangurakan; Kompleks Alun-alun Ler (Lapangan Utara) dan Mesjid Gedhe (Masjid Raya

Kerajaan); Kompleks Pagelaran, Kompleks Siti Hinggil Ler, Kompleks Kamandhungan Ler; Kompleks Sri Manganti; Kompleks Kedhaton; Kompleks Kamagangan; Kompleks Kamandhungan Kidul; Kompleks Siti Hinggil Kidul (sekarang disebut Sasana Hinggil); serta Alun-alun Kidul (Lapangan Selatan) dan Plengkung Nirbaya yang biasa disebut Plengkung Gadhing.

Bagian-bagian sebelah utara Kedhaton dengan sebelah selatannya boleh dikatakan sama (simetris). Sebagian besar bangunan di utara Kompleks Kedhaton menghadap arah utara dan di sebelah selatan Kompleks Kedhaton menghadap ke selatan. Di daerah Kedhaton sendiri bangunan kebanyakan menghadap timur atau barat. Namun demikian ada bangunan yang menghadap ke arah yang lain. Selain bagian-bagian utama yang berporos utara-selatan keraton juga memiliki bagian yang lain. Bagian tersebut antara lain adalah Kompleks Pracimosono, Kompleks Roto Wijayan, Kompleks Keraton Kilen, Kompleks Taman Sari, dan Kompleks Istana Putra Mahkota. Di sekeliling Kraton dan di dalamnya terdapat sistem pertahanan yang terdiri dari tembok atau dinding Cepuri dan Baluwerti. Secara umum tiap kompleks utama terdiri dari halaman yang ditutupi dengan pasir dari pantai selatan, bangunan utama serta pendamping, dan kadang ditanami pohon tertentu yang di anggap pantas berdiri disana. Kompleks satu dengan yang lain dipisahkan oleh tembok yang cukup tinggi dan dihubungkan dengan Regol yang biasanya bergaya *Semar Tinandu*. Daun pintu terbuat dari kayu jati yang tebal dan kokoh. Di belakang atau di muka setiap gerbang biasanya terdapat dinding penyekat yang disebut *Renteng* atau *Baturono*.

Bangunan-bangunan Keraton Yogyakarta lebih terlihat bergaya arsitektur Jawa tradisional. Di beberapa bagian tertentu terlihat sentuhan dari budaya asing seperti Portugis, Belanda, bahkan Cina. Bangunan di tiap kompleks biasanya berbentuk Joglo. Joglo terbuka tanpa dinding disebut dengan Bangsal sedangkan joglo tertutup dinding dinamakan Gedhong (gedung). Selain itu ada bangunan yang berupa kanopi beratap bambu dan bertiang bambu yang disebut Tratag. Pada perkembangannya bangunan ini beratap seng dan bertiang besi.

Permukaan atap joglo berupa trapesium. Bahannya terbuat dari sirap, genting tanah, maupun seng dan biasanya berwarna merah atau kelabu. Atap tersebut ditopang oleh tiang utama yang di sebut dengan *Soko Guru* yang berada di tengah bangunan, serta tiang-tiang lainnya. Tiang-tiang bangunan biasanya berwarna hijau gelap atau hitam dengan ornamen berwarna kuning, hijau muda, merah, dan emas maupun yang lain. Untuk bagian bangunan lainnya yang terbuat dari kayu memiliki warna senada dengan warna pada tiang. Pada bangunan tertentu (missal manguntur tangkil) memiliki ornamen *Putri Mirong*, stilasi dari kaligrafi Allah, Muhammad, dan *Alif Lam Mim Ra*, di tengah tiangnya.

Fungsi Keraton dibagi menjadi dua yaitu fungsi Keraton pada masa lalu dan fungsi Keraton pada masa kini. Pada masa lalu keraton berfungsi sebagai tempat tinggal para raja dan keturunannya. Keraton didirikan pada tahun 1755, selain itu di bagian selatan dari Keraton Yogyakarta, terdapat komplek kesatria yang digunakan sebagai sekolah khusus untuk putra-putra sultan. Sekolah mereka dipisahkan dari sekolah rakyat karena memang sudah merupakan aturan pada Keraton bahwa putra-

putra sultan tidak diperbolehkan bersekolah di sekolah yang sama dengan rakyat. Sementara itu, fungsi Keraton pada masa kini adalah sebagai tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh siapapun baik turis domestik maupun mancanegara supaya mengetahui budaya yang ada di masyarakat Jawa terutama budaya yang ada di keraton. Kraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya yang tidak ternilai harganya, baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah serta tradisi-tradisi yang ada di keraton. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika banyak nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Kraton Yogyakarta yang sangat menarik wisatawan dalam maupun luar negeri, sekaligus menjadi pusat studi dunia. Kraton Yogyakarta menjadi tempat yang cocok untuk belajar dan melihat kekayaan budaya Jawa yang masih terus dijaga dan dilestarikan sampai sekarang. Selain sebagai tempat wisata, tidak terlupakan pula fungsi Keraton yang bertahan dari dulu sampai sekarang yaitu sebagai tempat tinggal sultan dan keturunannya. Pada saat kita akan memasuki halaman kedua dari Keraton, terdapat gerbang dimana di depannya terdapat dua buah arca. Setiap arca ini memiliki arti yang berlawanan. Arca yang berada di sebelah kanan disebut Cingkorobolo yang melambangkan kebaikan, sementara itu arca yang terletak di sebelah kiri disebut Boloupotu yang melambangkan kejahatan. Selain itu kami juga mendapatkan sedikit informasi tentang Sultan Hamengku Buwono IX. Sultan ke IX dari Keraton Yogyakarta ini lahir pada tanggal 12 April 1940 dan wafat dalam usianya yang ke 48 yaitu pada tanggal 3 Oktober 1988. Ia memiliki berbagai macam hobi, diantaranya adalah

menari, mendalang, memainkan wayang, dan yang terakhir memotret. Sultan ini memiliki suatu semboyan yang sangat terkenal yaitu, “Tahta untuk rakyat”

I. Sosial Ekonomi

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2013 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 2,58 triliun rupiah dengan total pembelanjaan mencapai besaran 2,51 triliun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2013 Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta mengalami surplus keuangan sebesar 73,41 miliar rupiah. Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mencapai nilai 1,90 triliun rupiah. Dengan belanja sebesar 1,69 triliun rupiah membuat kabupaten ini mengalami surplus anggaran sebesar 206 miliar rupiah pada tahun 2013. Realisasi pendapatan/penerimaan daerah kabupaten/kota tahun 2013 yang terendah diterima oleh Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 1 triliun rupiah. Pada tahun tersebut Kabupaten Kulonprogo menggunakan anggaran sebesar 964,59 miliar sehingga mengalami surplus sebesar 38,59 miliar rupiah. Salah satu syarat yang diperlukan (necessary condition) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya (berupa dana

perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah. Jenis-jenis pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan realisasi PAD Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta tahun 2013 mencapai 38,87 persen dari total pendapatan.

Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, karena persentase PAD terhadap belanja daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk mencukupi belanja daerah sendiri. Selain itu juga ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, tentu kondisi melemahnya perekonomian global juga berpengaruh pada tingkat ekonomi di Indonesia. Tanda-tanda pelemahan ekonomi Indonesia ini sudah terlihat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga tahun ini. Triwulan ketiga tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit meningkat dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Triwulan ketiga kemarin, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih menunjukkan perlambatan, Bank Indonesia pesimistis pertumbuhan ekonomi tidak seperti yang mereka targetkan di awal tahun. Pihaknya memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2016 mendatang hanya sebesar 5%. Angka tersebut jauh di bawah perkiraan dari pertumbuhan ekonomi yang mereka tetapkan di awal tahun 2016 yaitu sebesar 5.5 sampai 5.6. Kondisi ekonomi tingkat nasional ini tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Bahkan tanda-tanda

melambatnya perekonomian Yogyakarta sudah terlihat pada penurunan pertumbuhan di triwulan ketiga dibanding triwulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga di Yogyakarta hanya sebesar 4,68%, sedikit lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya 5,67%.

Contents

BAB II	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	23
A.	Profil DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta	23
1.	Visi dan Misi DPRD	23
2.	Pimpinan DPRD DIY.....	24
3.	Alat Kelengkapan Dewan	24
B.	Fraksi – Fraksi DPRD DIY.....	26
1)	Pengertian Fraksi.....	26
C.	Tugas Fraksi.....	31
D.	Sejarah Suksesi Kepemimpinan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat	32
E.	Silsilah Keturunan Sri Sultan Hamengkubuwana X	39
F.	Pemerintahan.....	39
G.	Profil Daerah Istimewa Yogyakarta	40
H.	Sosial Budaya	46
I.	Sosial Ekonomi	54